

RINGKASAN

Zulfami
247410101004

Peran Pemerintah Kota Dalam Mewujudkan Pendidikan Politik
Sebagai Upaya Pencegahan Politik Uang (Pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe)

(Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H. Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M.)

Politik uang merupakan salah satu permasalahan serius dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia yang berpotensi merusak integritas pemilu, melemahkan kualitas partisipasi politik masyarakat, serta menghambat terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, upaya pencegahan politik uang tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum, melainkan juga memerlukan pendekatan preventif yang dilakukan secara sistematis melalui pendidikan politik kepada masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Kesbangpol dalam mewujudkan pendidikan politik sebagai upaya pencegahan politik uang serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan politik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan informan terkait, dan dokumentasi terhadap berbagai program pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Kota Lhokseumawe. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan Teori Demokrasi Partisipatoris sebagai *grand theory*, Teori *Good Governance* sebagai *middle theory*, dan Teori Pendidikan Politik sebagai *applied theory*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesbangpol Kota Lhokseumawe telah melaksanakan pendidikan politik melalui sosialisasi politik, seminar kebangsaan, dialog publik, pendidikan politik bagi pemilih pemula, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta penyuluhan bahaya politik uang. Secara yuridis, pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan tugas dan fungsi Kesbangpol dalam pembinaan kehidupan politik masyarakat, namun implementasinya belum optimal karena masih bersifat insidental, belum terintegrasi, dan lebih berorientasi pada tahapan pemilu. Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas pendidikan politik masih terkendala oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, belum optimalnya koordinasi antarlembaga, serta belum adanya kebijakan teknis yang mengatur pelaksanaan pendidikan politik secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi di lapangan.

Perlunya memperkuat kerangka kebijakan dan regulasi terkait pendidikan politik dengan menyusun pedoman teknis yang lebih operasional, termasuk standar operasional prosedur (SOP), indikator kinerja terukur, serta integrasi program pendidikan politik dalam perencanaan pembangunan daerah. Upaya ini harus diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan Kesbangpol, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun sistem manajemen program, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja agar setiap program pendidikan politik dapat diukur tingkat keberhasilannya secara objektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Politik Uang, Kesbangpol, Pemerintah Kota Lhokseumawe.

SUMMARY

Zulfami
247410101004

The Role Of The City Government In Realizing Political Education
As An Effort To Prevent Money Politics (At the Lhokseumawe
City National and Political Unity Agency)

(Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H. Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M.)

Money politics is one of the serious problems in the implementation of democracy in Indonesia which has the potential to damage the integrity of elections, weaken the quality of public political participation, and hinder the realization of the principle of people's sovereignty as guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, efforts to prevent money politics cannot only rely on a repressive approach through law enforcement, but also require a preventive approach that is carried out systematically through political education to the public.

This study aims to analyze the role of the Lhokseumawe City Government through Kesbangpol in realizing political education as an effort to prevent money politics and identify various obstacles and efforts made in the implementation of political education. This research uses an empirical legal research method with an empirical juridical approach. Research data was obtained through literature studies, interviews with related informants, and documentation of various political education programs implemented by the Lhokseumawe City Kesbangpol. The data obtained were then analyzed qualitatively using the Participatory Democracy Theory as the grand theory, the Good Governance Theory as the middle theory, and the Political Education Theory as the applied theory.

The results of the study show that the Lhokseumawe City Kesbangpol has carried out various political education programs through political socialization activities, national seminars, public dialogue, community organization development, political education for novice voters, and counseling activities regarding the dangers of money politics to the community. This research found that the implementation of political education still faces a number of obstacles, including budget limitations, low levels of community participation in political education activities, lack of optimal coordination between related institutions, limited human resources, and the lack of sustainable and integrated political education programs. This study concludes that political education is a strategic instrument in efforts to prevent money politics in Lhokseumawe City. The role of Kesbangpol as a facilitator and driver of community political education needs to be strengthened through the development of programs that are planned, sustainable, inclusive, and adaptive to local political dynamics.

The need to strengthen the policy and regulatory framework related to political education by developing more operational technical guidelines, including standard operating procedures (SOPs), measurable performance indicators, and the integration of political education programs in regional development planning. This effort must be accompanied by increasing the institutional capacity of Kesbangpol, both in terms of human resources, budget, and program management systems, as well as the development of a performance-based monitoring and evaluation system so that each political education program can be measured in an objective and sustainable manner.

Keywords: Political Education, Money Politics, Kesbangpol, Lhokseumawe City Government.